

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan keuangan dituntut untuk disajikan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Karena pentingnya bagi pemegang saham untuk memperoleh informasi yang handal dan relevan. Selain itu perusahaan juga harus melakukan pengungkapan secara transparan mengenai semua hal yang berkaitan dengan perusahaan. Tujuannya yaitu untuk menyakinkan kepada pihak luar bahwa laporan keuangan tersebut sudah disajikan secara benar dan dapat dipahami serta terhindar dari penyimpangan.

Laporan keuangan juga merupakan media bagi perusahaan serta sebuah catatan informasi keuangan dalam sebuah entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk mengambil suatu keputusan. serta dapat menggambarkan suatu kinerja perusahaan tersebut agar dapat mempertanggungjawabkan kinerja keuangan kepada publik.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Revisi 2009) merupakan standar yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik signifikan. BUMN termasuk perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik signifikan karena laporannya diberikan kepada masyarakat (Martani, 2015).

BUMN atau sebagai perusahaan pemerintahan harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Dalam PSAK NO 1 tentang penyajian laporan keuangan dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. PT. Kereta Api Indonesia (Persero)

merupakan salah satu BUMN yang juga menggunakan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) yang berlaku umum.

Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas (Windiastuti, 2013). Begitu juga di PT. Kereta Api Indonesia (Persero), untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan pemahaman akuntansi yang baik.

Dalam berita TRANS (2015), berdasarkan hasil audit kinerja tahun 2014, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) memberikan 12 rekomendasi untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Kementrian BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Hasil audit BPK 2014 pada BUMN itu, sedikitnya ada 5 temuan ganjil dengan nilai sebesar Rp. 18,78 miliar. Temuan yang dihasilkan melitkat bahwa operasional PT. KAI tidak sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan. (www.iict.co.id/BeritaTRANS/). Berarti dapat diasumsikan bahwa pegawai yang bekerja di unit keuangan dan akuntansi masih mempunyai adanya kekurangan dalam pemahaman akuntansi dan kurangnya pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan.

Dalam pengelolaan keuangan yang baik, BUMN harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan pemahaman akuntansi yang luas dan sesuai dengan standar. Berdasarkan hasil penelitian Akbar (2014) sumber daya manusia salah satu faktor berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Ketika kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) meningkat maka kualitas laporan keuangan juga pasti akan meningkat.

Menurut Windiastuti (2013), pendidikan merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia terutama untuk pengembangan aspek intelektual dan kepribadian manusia. Tingkatan pendidikan sering kali menjadi indikator yang menunjukkan derajat intelektualitas seseorang, semakin tinggi pengetahuan maka semakin tinggi pengetahuan dan tingkat intelektualitas seseorang.

Dengan tingkat pendidikan yang memadai maka seseorang lebih mudah dalam melaksanakan tugasnya. Dalam pengelolaan keuangan yang baik, BUMN harus memiliki pemahaman akuntansi yang kompeten dengan dilatarbelakangi pendidikan akuntansi atau keuangan.

Selain pendidikan, pengalaman kerja juga diperlukan dalam menilai kualitas sumber daya manusia. Hal ini dipaparkan dalam penelitian Windiastuti (2013) yang menyatakan bahwa pengalaman kerja di suatu organisasi menjadi salah satu indikator bahwa seseorang telah memiliki kemampuan yang lebih. Semakin lama pegawai bekerja dalam suatu organisasi, maka semakin berpengalaman pegawai tersebut dan semakin memahami apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada pegawai tersebut.

Rendahnya kualitas laporan dapat disebabkan oleh pemahaman akuntansi dari penyusun laporan itu sendiri atau belum diterapkannya sistem informasi akuntansi keuangan secara optimal, serta peran internal audit yang masih lemah. Dalam penyusunan laporan keuangan yang baik, pemahaman akuntansi mempunyai peran penting terhadap kualitas laporan keuangan. Seperti yang dipaparkan dalam penelitian Yuliani (2010), menyatakan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Semakin

sumber daya manusia memahami akuntansi akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang akan dihasilkan oleh suatu entitas.

Selain pemahaman akuntansi, hal yang mendasar dan penting dari penerapan akuntansi di dalam kualitas laporan keuangan adalah perkembangan teknologi dan ekonomi yang ada di setiap negara membutuhkan pemerintahan yang baik atau *Good Governance*. *Good Governance* adalah sebuah bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun negara sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan (Aswadi, 2014).

Dalam sebuah instansi *Good corporate governance*, tujuannya utama adalah untuk dapat meningkatkan nilai tambah bagi *stakeholder* yaitu kaidah norma ataupun praktik bisnis yang sehat dan beretika (Tunggal, 2010 dalam Rosdiani, 2011). BUMN yang baik harus memerlukan praktik pengawasan yang mengacu pada prinsip GCG. Keputusan Menteri BUMN Nomor 117 tahun 2002, tentang Penerapan Praktek *good corporate governance* pada BUMN, dimana BUMN diwajibkan untuk menerapkan *good corporate governance* secara konsisten dan menjadikan *good corporate governance* sebagai landasan operasionalnya.

Isu *good corporate governance* (GCG) berkembang pesat di seluruh dunia selama 10 tahun terakhir ini. Secara umum intuisi merasakan bahwa isu ini memang penting dan harus hadir di dunia bisnis pada umumnya, namun apa sebenarnya GCG itu masih belum banyak masyarakat yang memahaminya. Pada intinya GCG bukanlah merupakan kepentingan sebuah perusahaan serta para *stakeholder* terdekatnya belaka, namun juga merupakan urusan para *stakeholder* perusahaan secara luas yaitu masyarakat nasional dan internasional (Widilestariningtyas dan Utami, 2008).

Ada lima prinsip-prinsip GCG pada Keputusan Menteri BUMN Nomor 117 tahun 2002 yaitu transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kewajaran. Kelima komponen dalam GCG itu penting karena penerapan prinsip GCG secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Dalam penelitian Rosdiani (2011) menyebutkan bahwa penerapan *Good corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Selain itu, dalam penelitian Widilestariningtyas dan Utami (2008) yang mengambil penelitian penerapan GCG terhadap kualitas laporan keuangan PLN, BUMN menyatakan bahwa penerapan *good corporate governance* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah GCG juga menjadi pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan selain pemahaman akuntansi.

Pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (*openness*) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik, transparansi maupun akuntabilitas adalah bagian dari GCG Aswadi (2014).

Disisi lain, setiap kepala pemerintahan mengupayakan pencapaian laporan keuangan yang berkualitas. Sehingga, penting untuk diuji kembali sejauh mana kualitas laporan keuangan. Penelitian tentang pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan telah banyak dilakukan sebelumnya, diantaranya penelitian Aswadi (2014), menyatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi memberikan pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintahan kabupaten Pirang.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah keduanya sama-sama membahas penerapan *good corporate governance* terhadap kualitas laporan keuangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terdapat pada penambahan variabel pemahaman akuntansi.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk menelaah secara lebih mendalam pada penelitian ini, dan diharapkan dapat diketahui sampai sejauh mana pengaruh pemahaman akuntansi serta penerapan GCG terhadap kualitas laporan keuangan PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Pemahaman Akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero)?
2. Apakah Penerapan *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero)?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pemahaman Akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan PT. Kereta Api Indonesia (Persero).
2. Untuk mengetahui pengaruh Penerapan *Good corporate governance* terhadap kualitas laporan keuangan PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Instansi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai evaluasi bagi para pegawai tentang kualitas laporan keuangan.

2. Bagi Pihak Perguruan Tinggi

Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk menambah informasi dan pengetahuan dalam mengembangkan ilmu terutama tentang laporan keuangan, penerapan *good corporate governance* dan pemahaman akuntansi.

3. Bagi Pihak Lain

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pembanding dan referensi dalam menerapkan teori dan praktik bagi peneliti lain yang sejenis di masa yang akan datang.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan menjadi bahan referensi dan informasi yang bermanfaat, khususnya mengenai topik penerapan *good corporate governance* dan pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan, dengan penelitian ini apabila ada yang bermaksud untuk melakukan penelitian lebih lanjut.